

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS BUNGKUKAN KECAMATAN KELUMPANG BARAT KABUPATEN KOTABARU

Sudartik^{*1}, Iswiyati Rahayu, Murakhman Sayuti Enggok², ¹Mahasiswa,
Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik

²Dosen, Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

*Korespondensi Penulis: No. Telp: 085350597000. Email: sudartik.ktb@gmail.com

Abstract Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Untuk menjamin akses penduduk Kabupaten Kotabaru terhadap pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru membuat kebijakan melalui program Pelayanan Kesehatan Gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis pada Puskesmas Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan yaitu : Sekretaris Dinkes Kabupaten Kotabaru, Kepala Seksi Pembiayaan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan beserta staf, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kotabaru dan pengelola pelayanan kesehatan gratis Puskesmas Kabupaten Kotabaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru belum maksimal dan masih terdapat kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Penataan sumber daya manusia seharusnya berjalan dengan maksimal agar program dapat terus berjalan, penggunaan sarana prasarana masih terjadi kesenjangan dalam memperoleh pelayanan kesehatan gratis, dan masih terdapat masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan kartu peserta kesehatan gratis. Puskesmas Kecamatan sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan Gratis diharapkan untuk lebih mengintensifkan sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan gratis, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pemasangan spanduk sehingga informasi tentang program Pelayanan Kesehatan Gratis bisa sampai ke pelosok-pelosok desa.

Keywords: *Implementasi, Kebijakan, Pelayanan Kesehatan Gratis*

Health is a human right and one element of prosperity that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as intended in Pancasila and the 1945 Constitution. Every activity in an effort to maintain and improve the level of public health is carried out based on the principles of non-discrimination, participatory and sustainable in the context of the formation of Indonesia's human resources, as well as increasing the nation's resilience and competitiveness for national development. To ensure access for residents of Kotabaru Regency to health services, the Kotabaru Regency Government has created a policy through the Free Health Services program. This research aims to find out how the Free Health Service policy is implemented at the West Kelumpang District Health Center, Kotabaru Regency. This research used a qualitative descriptive method with informants, namely: Secretary of the Kotabaru Regency Health Office, Head of the Health Financing and Human Resources Section and staff, Head of the Kotabaru Regency Community Health Center and manager of free health services at the Kotabaru Regency Health Center. The results of the research show that the implementation of the Free Health Service Policy at the West Kelumpang District Health Center, Kotabaru Regency has not been optimal and there are still deficiencies that need to be corrected. The arrangement of human resources should run optimally so that the program can continue to run, there is still a gap in the use of infrastructure in obtaining free health services, and there are still underprivileged people who have not received free health participant cards. The District Health Center as the implementer of the Free Health Insurance program is expected to further intensify the outreach regarding free health services, for example by conducting outreach and putting up banners so that information about the Free Health Services program can reach remote villages.

Keywords: *Implementation, Policy, Free Health Services*

- organizational behavior. *Research in Organizational Behavior*, 1, 75–123.
- Iqbal, M. Z., Akbar, S., Budhwar, P., & Shah, S. Z. A. (2019). Effectiveness of performance appraisal: Evidence on the utilization criteria. *Journal of Business Research*, 101(April), 285–299.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.04.035>
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Merbun B.N, 1988. "Proses Pembangunan Desa", Erlangga. Jakarta
- Moeheriono. 2013. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta : PT. Raja. GrafindoPersada.
- Mulyadi, I. R. (2017). Efektivitas Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi (Studi di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang). 126.
- Nanggala, J. (2015). Analysis The Performance Appraisal Effectiveness On Employee Performance At PT. Pelindo IV (Persero) Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 602–610.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Purwanto, E. A., Tyastianti, D., Taufiq, A., & Novianto, W. (2016). "Pelayanan publik " Modul Pelatihan Dasar Kader PNS. Modul Pelayanan Publik, 1–101.
<http://pusbindiklat.lipi.go.id/wp-content/uploads/MODUL-PELAYANAN-PUBLIK-CETAK.pdf>
- Setiawan, A., Kom, M., Burch, J., & Grudnitski, G. (2015). 1. Pendahuluan. IX (Tahap II), 1–21.
- Siagian P. Sondang, 1999. "Administrasi Pembangunan", Bumi Aksara,
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafi'i Inu Kencana, dkk , 1999. "Ilmu Administrasi Publik", Rineka Cipta. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wayne Parsons, 2006, *PUBLIC POLICY Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja HAW, 2004. PT. "Otonomi Desa", RadjaGrafindo Persada. Jakarta
- William N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.